

*Tesis*

**PENERAPAN PASAL 112 UUD NOMOR 35  
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA  
PADA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Oleh :

**IRVAN MAULANA  
NIM : 1820112005**



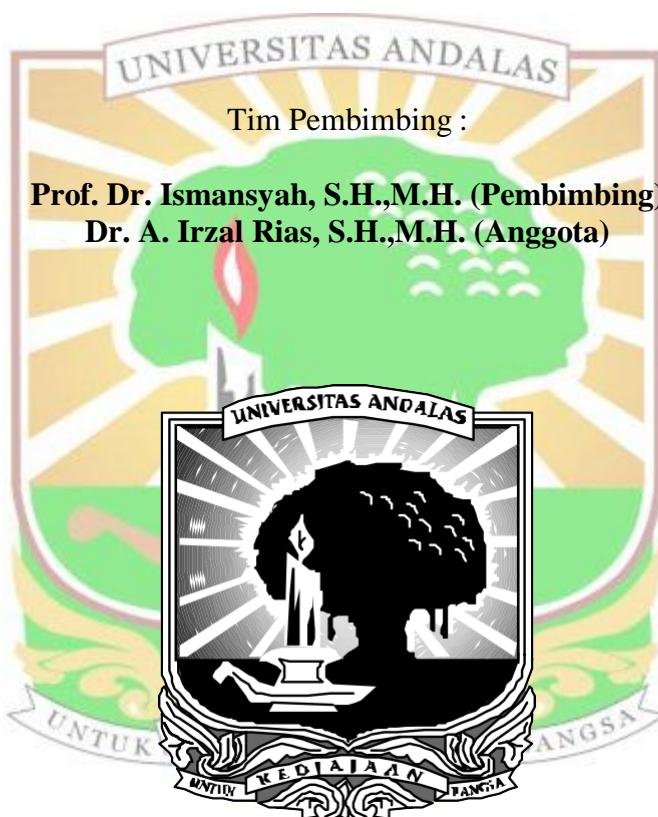
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2020**

**PENERAPAN PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA  
PADA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

*Tesis*

Oleh :

**IRVAN MAULANA**  
NIM : 1820112005



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2020**

**PENERAPAN PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA  
PADA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**Oleh : IRVAN MAULANA**

Tim Pembimbing:

Prof. Dr. Ismansyah, SH.,MH. (Pembimbing I) dan Dr. A. Irzal Rias, SH.,MH. (Pembimbing II)

**ABSTRAK**

Dalam proses penegakkannya, penerapan Pasal 112 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menimbulkan multtafsir dan ketidakjelasan. Pasal multtafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkotika (pengedar) akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkotika. Hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya. unsur menyimpan dalam Pasal 112 undang-undang Narkotika memiliki arti bahwa pelaku menaruh Narkotika tersebut di tempat yang aman. Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Berarti menguasai dalam unsur Pasal 112 undang-undang Narkotika mengandung arti bahwa narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut. Rumusan masalah penelitian ini adalah; (1) Bagaimanakah kepastian hukum Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap kejahatan Narkotika di Indonesia, (2) Bagaimanakah Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh para penegak hukum dalam sistem peradilan atas kejahatan Narkotika di Indonesia?, dan (3) Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan norma Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam praktiknya. Karena penelitian ini mengkaji penegakan hukum atas kejahatan yang diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka penelitian ini masuk kategori penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier, sepanjang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian hukum normatif hanya menggunakan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan (*library research*). dari penelitian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 undang-undang Narkotika yaitu setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Maksud dari setiap orang adalah orang perseorangan, kemudian, Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat diterapkan pada penyalahgunaan narkotika. Pada praktiknya penggunaan pasal tersebut masih terjadi ambiguitas dan multtafsir, apakah pasal tersebut dapat diterapkan untuk penyalahgunaan narkotika atau tidak. Pasal yang multtafsir itulah yang sering dimanfaatkan oleh para pihak yang berkepentingan terutama para pelaku tindak pidana berlindung sebagai penyalahgunaan narkotika untuk menghindari sanksi pidana yang lebih berat.

*Kata kunci: Narkotika, Penegakan hukum, rehabilitasi*

# **THE APPLICATION OF ARTICLE 112 LAW NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS ON THE CASE OF NARCOTICS CRIMINAL ACTS**

*By: IRVAN MAULANA*

Advisory Team:

Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H. (Supervisor I) and Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H. (Advisor II)

## ***ABSTRACT***

In the enforcement process, the application of Article 112 of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics raises multiple interpretations and ambiguities. The multi-interpretation article will cause the perpetrators of narcotics crimes (dealers) to take cover as if they were victims of narcotics crimes. This will have an impact on sentencing with a short sentence so as to cause injustice in the implementation process. the element of saving in Article 112 of the Narcotics Act means that the offender places the Narcotics in a safe place. Mastering in the Big Indonesian Dictionary means to rule over (something), hold power over (something). Means controlling in the elements of Article 112 of the Narcotics Law means that the narcotics are under the authority of a person (perpetrator) or the perpetrators hold the authority over the narcotics. This research problem formulation is; (1) What is the legal certainty of Article 112 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics for Narcotics crimes in Indonesia, (2) How is the application of Article 112 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics by law enforcers in the justice system for Narcotics crimes in the Narcotics crime in Indonesia ?, and (3) What efforts can be made to overcome the problem of norms in Article 112 of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics in practice. Because this study examines law enforcement for crimes regulated in Article 112 of Law Number 35 Year 2009 Regarding Narcotics, this research is categorized as a normative legal research. Normative legal research is conducted (mainly) on primary, secondary, tertiary legal materials, insofar as they contain legal norms. Normative legal research uses only secondary data. Secondary data collection is done through documentation studies or library research (library research). from the research it can be concluded that the elements contained in Article 112 of the Narcotics Law are that every person, without rights or against the law, owns, stores, controls or provides. The purpose of each person is an individual, then, Article 112 of Law Number 35 Year 2009 can be applied to narcotics abusers. In practice, the use of the article still occurs ambiguity and multiple interpretations, whether the article can be applied to narcotics abusers or not. This multi-interpretation article is often used by the parties concerned, especially the perpetrators of criminal acts to protect themselves as narcotics abusers to avoid more severe criminal sanctions.

*Keywords; Narcotics, law enforcement, rehabilitation.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan anugerahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul: **“PENERAPAN PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA”.**

Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat akademik yang harus di penuhi dalam menyelesaikan studi Strata Dua (S2) untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program MagisterIlmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Dalam penyelesaian penulisan Tesis ini, penulis menyadari bahwa hal ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang dengan ikhlas memberikan bimbingan dan masukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, ruang ini penulis manfaatkan untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada mereka semua. Tanpa peran mereka tidak mungkin Tesis ini dapat terselesaikan oleh penulis. Meskipun disadari tidak mungkin menyebut nama mereka satu persatu, namun di antara nama-nama berikut menjadi sebuah keniscayaan untuk menyebutkannya.

Terkhusus kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ismansyah, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. A. Irzal Rias, S.H.,M.H., sebagai Pembimbing II penulis dalam menyelesaikan Tesis ini yang dalam kesibukan sehari-hari beliau, menyempatkan untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Prof. Dr. Ismansyah, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. A. Irzal Rias, S.H.,M.H tidak hanya membimbing dan mengarahkan penulis dalam

menyelesaikan Tesis ini, beliau juga memberikan motivasi dan dorongan yang besar kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan Tesis ini. Untuk itu doa penulis semoga beliau diberikan kemudahan dalam segala aktivitas dan memperoleh amal ibadah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Disamping itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., sebagai Rektor Universitas Andalas.
2. Bapak Prof. Dr. Busrya Azheri, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Ibu Dr. Khairani, SH., M.H, selaku Koordinator Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan dan memudahkan pelayanan selama mengikuti pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak-Bapak dan Ibu-ibu Para Dosen/Pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah mencerahkan ilmunya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M, Ibuk Dr. Aria Zurneti, S.H., M.H., dan bapak Dr. Fadilah Sabri, S.H., M.H., yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan masukan serta hadir di forum ujian proposal dan seminar hasil penelitian guna memberi masukan demi kesempurnaan Tesis ini.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian	15
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual	18
1. Kerangka Teoritis	18
a. Teori Kepastian Hukum	19
b. Teori Keadilan	24
2. Kerangka Konseptual	29
G. Metode Penelitian	31
1. Tipe Penelitian	31
2. Pendekatan Penelitian	32
3. Metode Pengumpulan Data	33
4. Metode Pengolahan Data	35

5. Metode Analisis Data	35
<b>BAB II : KERANGKA TEORITIS TENTANG NARKOTIKA DAN JENIS-JENISNYA</b>	
A. Pengertian Narkotika	37
B. Sejarah dan perkembangan Narkotika	40
C. Jenis-jenis Narkotika	41
<b>BAB III : KEPASTIAN HUKUM PENEGAKKAN HUKUM ATAS KEJAHATAN NARKOTIKA DI INDONESIA</b>	
A. Narkoba Menurut Hukum Positif Indonesia	59
B. Peraturan-Peraturan Perundang-undang lainnya yang terkait dengan dengan Hukum Narkoba	69
<b>BAB IV : PENERAPAN PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA OLEH PARA PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN ATAS KEJAHATAN NARKOTIKA DI INDONESIA</b>	
A. Unsur-unsur Ketentuan pasal 112 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	73
B. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri pada Putusan No. 637/Pid.B/2015/PN.Mks	83
C. Penerapan Pasal 112 dalam Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2016/Pn.Ska	98
D. Penerapan Pasal 112 dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2010/PN.Slw	102
<b>BAB V : UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN NORMA PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM PRAKTIKNYA</b>	

A. Permasalahan yang timbulkan dari adanya ketentuan atas Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009	106
B. Solusi Atas Permasalahan yang timbulkan dari adanya ketentuan atas Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009	118
<b>BAB VI : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	123
B. Saran	127
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	129

